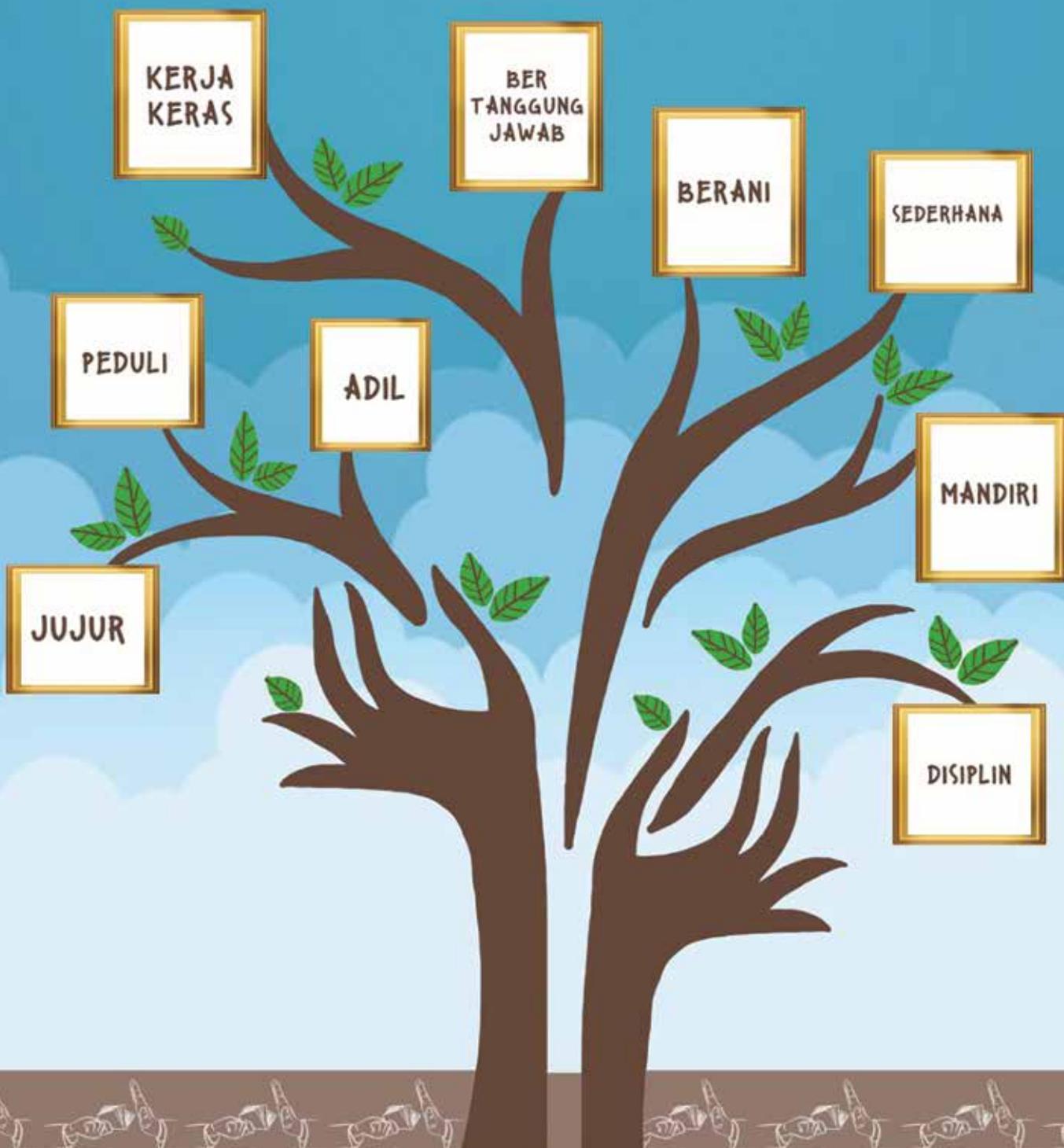




## ZERO TOLERANCE UNTUK PELANGGARAN INTEGRITAS



**M**enutup tahun 2022, *Warta Pemeriksa* mengangkat mengenai isu penanganan korupsi di Tanah Air. Hal ini juga terkait dengan pelaksanaan Hari Antikorupsi Sedunia yang biasa diperingati setiap 9 Desember.

Edisi Desember 2022 ini dimulai dengan informasi mengenai kesiapan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam merespons dugaan-dugaan pelanggaran kode etik. Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III BPK sekaligus Ketua Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK Achsanul Qosasi mengatakan, perbaikan dan penyempurnaan penegakan integritas di lingkungan BPK akan terus dilakukan. Hal ini sejalan dengan konsep organisasi pembelajar yang harus mampu merespons setiap kebutuhan atau perkembangan yang berpengaruh terhadap organisasi.

Di rubrik BPK Bekerja, redaksi juga melaporkan mengenai Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2022. Hasil yang disampaikan antara lain mengenai pemantauan atas pemanfaatan laporan hasil pemeriksaan investigatif (PI), penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA) yang diterbitkan pada periode 2017 hingga semester I 2022.

Pemantauan dilakukan terhadap pemanfaatan laporan hasil PI dalam proses penyelidikan dan penyidikan, pemanfaatan laporan hasil PKN dalam penyiapan P-21 atau berkas penyidikan sudah lengkap dan proses penyidikan, serta PKA yang dihadiri BPK untuk digunakan dalam tuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Pada periode 2017-semester I 2022, BPK menyampaikan 25 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp31,55 triliun dan 311 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp57,53 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan PKA atas 324 kasus pada tahap persidangan.

Simak juga wawancara redaksi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai sosialisasi sembilan nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi. Kesembilan nilai itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

Redaksi memaparkan bagaimana upaya KPK untuk dapat menyisipkan sembilan nilai tersebut ke dalam perilaku seluruh masyarakat di Tanah Air. Mulai dari anak-anak hingga para pebisnis dan pejabat pemerintahan.

Jangan lewatkan juga laporan redaksi mengenai suka duka para MC atau *master of ceremony* yang biasa mengawal acara-acara BPK. Bagaimana mereka dari semula hanya pegawai biasa hingga akhirnya 'tercebur' dan menjadi MC yang sering ditemui para pegawai BPK di berbagai event.

Silakan menikmati. ●

---

## TIM EDITORIAL

### Pengarah

Isma Yatun  
Agus Joko Pramono  
Bahtiar Arif

### Penanggung Jawab

R. Yudi Ramdan Budiman

### Ketua Tim Redaksi

Sri Haryati

### Kepala Sekretariat

Bestantia Indraswati

### Sekretariat

Bambang Supriedi  
Klara Ransingin  
Ridha Sukma  
Sigit Rais  
Frenny Artiningrum S.  
Apriyana  
Sudarman

### Alamat Sekretariat

Gedung BPK-RI  
Jalan Gatot Subroto no 31  
Jakarta  
Telepon: 021-25549000  
Pesawat 1188/1187  
Email: wartapemeriksa@bpk.go.id  
www.bpk.go.id

Diterbitkan oleh  
Sekretariat Jenderal  
Badan Pemeriksa Keuangan  
Republik Indonesia

---

Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/barang/fasilitas lainnya dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)



## 4 BPK SIAP MERESPONS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Achsanul menekankan, BPK menerapkan *zero tolerance* untuk pelanggaran integritas.

- 8 BPK LAPORKAN 311 PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA SENILAI RP57,53 TRILIUN
- 9 TATA CARA PEMERIKSAAN INVESTIGATIF, PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA, DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI OLEH BPK



## 13 PERAN AKUNTAN DALAM SEKTOR PEMERINTAHAN

Akuntan yang bekerja di sektor pemerintahan harus memahami Standar Akuntansi Pemerintahan.

- 17 BPK PAPARKAN PENGALAMAN TINGKATKAN KUALITAS VNR 2021
- 19 WAKIL KETUA BPK HADIRI PERTEMUAN UN IAAC KE-60 DI NEW YORK
- 20 MEMAPARKAN SEMBILAN NILAI ANTIKORUPSI
- 22 KOMUNITAS MC: SUKA DUKA PARA PEMBUKA ACARA SEREMONIAL BPK
- 25 PENGHAPUSAN HONORER DAN PERAN PPPK DALAM SISTEM KEPEGAWAIAN BPK
- 28 PEMERIKSA DIHARAPKAN BERIKAN HASIL YANG BERKUALITAS DAN BERMANFAAT
- 29 4 SATKER BPK RAIH PREDIKAT WBBM
- 31 EDUKASI ANTIKORUPSI BAGI ANAK-ANAK, PENTINGKAH?
- 36 BERITA FOTO

## BPK SIAP MERESPONS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK



■ Achsanul Qosasi

Achsanul menekankan, BPK menerapkan *zero tolerance* untuk pelanggaran integritas.

**P**erbaikan dan penyempurnaan penegakan integritas di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan terus dilakukan. Hal ini sejalan dengan konsep organisasi pembelajar yang harus mampu merespons setiap kebutuhan atau perkembangan yang berpengaruh terhadap organisasi.

Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan

Keuangan Negara III BPK sekaligus Ketua Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK Achsanul Qosasi mengatakan, saat ini BPK sudah lebih siap dan lebih baik dalam merespons dugaan-dugaan pelanggaran kode etik. "Kalau ada yang bilang *kok* sekarang malah semakin banyak pelanggaran yang terjadi, saya memandang bahwa justru itu salah satu indikator bahwa sistem telah berjalan," ujar Achsanul kepada *Warta Pemeriksa*.

BPK saat ini sudah lebih mampu untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengungkap sejumlah pelanggaran kode etik. Selain itu, menurut Achsanul, laporan pengaduan ke Inspektorat Utama (Itama) BPK juga menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan dari para pegawai terhadap sistem pelaporan yang dimiliki BPK.

“Pelapor juga percaya bahwa setiap laporan akan ditindaklanjuti dan kerahasiaannya juga terjamin, baik kerahasiaan identitas pelapor maupun kerahasiaan materi laporan,” ujarnya.

Upaya penegakan integritas telah dibagi ke dalam tiga komponen dengan frasa yang mudah diingat yaitu “Trilogi Pembangunan Integritas”. Ketiga komponen tersebut yakni pembangunan budaya integritas, pembangunan sistem, dan penegakan integritas.

Achsanul menyampaikan, pembangunan budaya integritas bertujuan agar pimpinan dan pegawai BPK secara sadar memilih untuk tidak melakukan pelanggaran. Hal ini karena sudah memahami standar moral dan etika yang tinggi dalam bentuk budaya integritas.

Komponen ini antara lain fokus pada komitmen dari pimpinan BPK (*tone from the top*), diseminasi, kampanye, dan edukasi nilai-nilai dasar untuk membangun kesadaran berintegritas.

Komponen kedua yaitu pembangunan sistem bertujuan untuk mencegah dan menjaga agar pelaksana BPK tidak melanggar integritas. Pada komponen ini, butir kegiatan yang dilakukan adalah penerapan *Fraud Control System (FCS)* dan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. FCS merupakan sebuah pendekatan holistik untuk mengendalikan pelanggaran dan kecurangan di internal BPK.

Kemudian yang terakhir adalah penegakan integritas berupa penerapan sanksi secara tegas, cepat, dan konsisten untuk memberikan efek jera. BPK juga membangun kerja sama dengan aparat atau ins-



**Kalau ada yang bilang kok sekarang malah semakin banyak pelanggaran yang terjadi, saya memandang bahwa justru itu salah satu indikator bahwa sistem telah berjalan.**

tansi penegak hukum sehingga diharapkan pelaksana BPK tidak berani melanggar karena takut terkena sanksi.

Sebagian satker juga telah menerapkan serangkaian prosedur untuk membangun penegakan integritas dalam bentuk antara lain secara berkala pimpinan mengarahkan kepada para pelaksana BPK untuk menjaga integritas. Begitu pula dengan pertemuan dengan entitas. Saat *entry meeting*, tim pemeriksa berusaha mengingatkan entitas agar membantu BPK untuk menjaga integritas dengan tidak memberikan hal apa pun baik yang berkaitan dengan tugas pemeriksaan maupun tidak. Sebagian pasal yang terkait dengan kode etik BPK juga dicantumkan dalam surat tugas yang diterbitkan oleh BPK sehingga entitas pemeriksaan dapat membaca larangan tersebut.

Pembangunan integritas di BPK juga sudah dijalankan bahkan sejak seleksi CPNS dengan adanya materi terkait independensi, integritas, dan profesionalisme (IIP) BPK dalam materi Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) dengan bentuk diskusi kelompok dan wawancara. Upaya ini menunjukkan bahwa BPK telah berupaya menyaring pegawai dengan menggunakan komponen nilai dasar BPK. Dengan demikian, pegawai yang lulus seleksi telah memahami nilai-nilai dasar BPK.

“Selanjutnya, hal yang mungkin perlu ditingkatkan adalah *background screening* kepada calon pegawai dan proses *profiling* atau pengumpulan data awal pegawai sehingga informasi mengenai pegawai bisa lebih komprehensif dan dapat dilakukan *cross check* dengan data yang lain yang tersedia dalam sistem.



**Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS juga diproses melalui pemeriksaan disiplin dalam rangka mengumpulkan bukti yang memadai atas dugaan pelanggaran tersebut dan memberikan laporan yang komprehensif sehingga pimpinan dapat mengambil kebijakan dengan tegas, cepat, dan konsisten.**

Achsanul menjelaskan, adanya dugaan pelanggaran kode etik BPK ditindaklanjuti dengan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran oleh Itama, kemudian dilanjutkan dengan sidang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. Apabila terbukti melanggar Kode Etik BPK sesuai dengan putusan MKKE, pegawai tersebut akan diberi hukuman sesuai dengan peraturan BPK tentang kode etik BPK. Mekanisme ini diatur dalam Peraturan BPK Nomor 4 tahun 2018 tentang Kode Etik BPK dan Peraturan BPK Nomor 5 tahun 2018 tentang Majelis Kehormatan dan Kode Etik BPK.

“Selain itu, pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS juga diproses melalui pemeriksaan disiplin dalam rangka mengumpulkan bukti yang memadai atas dugaan pelanggaran tersebut dan memberikan laporan yang komprehensif sehingga pimpinan dapat mengambil kebijakan dengan tegas, cepat, dan konsisten. Pemeriksaan disiplin PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS,” ujarnya.

Sejak Januari 2022 hingga pertengahan Desember 2022, terdapat 27 pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik BPK atau pelanggaran disiplin PNS oleh pelaksana BPK yang diterima dan ditindaklanjuti oleh Itama untuk dilakukan proses pemeriksaan etik atau pemeriksaan disiplin PNS. Terhadap Pelaksana BPK yang terbukti melanggar Kode Etik BPK ataupun Disiplin PNS telah diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Penggunaan instrumen teknologi juga sudah dimanfaatkan dalam peningkatan integritas di BPK. Itama sudah menggunakan berbagai instrumen teknologi seperti pemanfaatan aplikasi berbasis *website* untuk pengelolaan pengaduan melalui aplikasi *whistleblowing system*, pelaporan gratifika-

si melalui aplikasi PPG, dan pengembangan sistem audit internal dengan menggunakan *software* TeamMate+.

“Kami juga sudah mulai untuk menggunakan forensik digital dalam pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik. Kemudian, kami juga bekerja sama dengan Biro TI untuk mengembangkan dan menggunakan *big data analytics* untuk kelancaran proses pemeriksaan dan penegakan integritas di BPK,” ujarnya.

Achsanul menekankan, BPK menerapkan *zero tolerance* untuk pelanggaran integritas. Meski demikian, ia menyadari bahwa *fraud*, korupsi, dan kecurangan tidak akan pernah bisa dihapuskan secara utuh.

“Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah membuat suatu sistem yang bisa mengurangi kejadian tersebut, mengurangi peluang orang untuk melakukan kecurangan dengan pengendalian dan pencegahan yang kuat, dan terakhir prosedur respons yang cepat dan terukur apabila kita mendeteksi adanya potensi atau dugaan kecurangan muncul ke permukaan dengan mekanisme sanksi yang adil, tegas, dan konsisten,” ujar Achsanul.

Menurut Achsanul, apabila ekspektasi publik sudah terjaga diikuti dengan pengendalian yang matang dan kuat serta mekanisme pemberian sanksi yang konsisten, maka BPK akan mampu menjadi organisasi yang bersih dan jauh dari isu integritas. “Saya berpesan kepada semua pegawai untuk menanamkan rasa malu, agar lebih meningkatkan integritas pada diri masing-masing pegawai baik di dalam maupun di luar lingkungan kantor BPK. Organisasi kita perlu kita jaga bersama, jika ada pelanggaran dari pegawai lain yang diketahui maka tolong dilaporkan kepada atasan secara berjenjang atau kepada Itama.” ●



Dalam BKN Awards 2022 yang diadakan pada 21 Juli 2022 di Batam, BPK memperoleh tiga penghargaan yaitu:



### Peringkat 1

atas capaian dalam perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian.



### Peringkat 4

atas capaian dalam penerapan pemanfaatan data-sistem informasi dan CAT.



Implementasi Manajemen ASN Terbaik.

## BPK LAPORKAN 311 PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA SENILAI RP57,53 TRILIUN

BPK juga telah melaksanakan PKA atas 324 kasus pada tahap persidangan.

**I** khtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2022 memuat hasil pemantauan atas pemanfaatan laporan hasil pemeriksaan investigatif (PI), penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA) yang diterbitkan pada periode 2017 hingga semester I 2022. Pemantauan dilakukan terhadap pemanfaatan laporan hasil PI dalam proses penyelidikan dan penyidikan, pemanfaatan laporan hasil PKN dalam persiapan P-21 atau berkas penyidikan sudah lengkap dan proses penyidikan, serta PKA yang dihadiri BPK untuk digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada periode 2017-semester I 2022, BPK menyampaikan 25 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp31,55 triliun dan 311 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp57,53 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan PKA atas 324 kasus pada tahap persidangan.

BPK memerinci, dari 25 laporan hasil PI yang sudah disampaikan, sembilan laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 16 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan. Sebanyak dua laporan PI dilaksanakan pada pemerintah pusat, 11 laporan pada pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan 12 laporan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kemudian, dari 311 laporan hasil PKN yang telah disampaikan, 46 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 265 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap). Dari laporan

tersebut, sebanyak 52 PKN dilaksanakan pada pemerintah pusat, 214 PKN pada pemerintah daerah dan BUMD, serta 45 PKN pada BUMN.

Selain itu, sebanyak 324 pemberian keterangan ahli di persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh JPU. Secara lebih detail, sebanyak 53 PKA dilakukan pada tingkat pemerintah pusat, 211 PKA pada pemerintah daerah dan BUMD, dan 60 PKA pada BUMN.

IHPS I 2022 juga memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-semester I 2022 dengan status telah ditetapkan. Nilai penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tersebut tidak termasuk nilai kerugian negara/daerah dari hasil penghitungan kerugian negara atas permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan selama periode 2005-semester I 2022 adalah sebesar Rp4,56 triliun.

Kerugian negara/daerah yang terjadi pada pemerintah daerah sebesar Rp3,33 triliun (73 persen) merupakan nilai yang terbesar dari total kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan periode 2005-semester I 2022. Adapun tingkat penyelesaian atas ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD masing-masing sebesar 65 persen, 59 persen, 37 persen, dan 36 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki persentase penyelesaian ganti rugi negara yang paling tinggi. ●



## TATA CARA PEMERIKSAAN INVESTIGATIF, PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA, DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI OLEH BPK

Dalam beleid tersebut dijelaskan, penghitungan kerugian negara/daerah dilakukan berdasarkan permintaan dari instansi yang berwenang.



**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapatkan mandat untuk melaksanakan pemeriksaan investigatif (PI) guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Selain itu, BPK juga dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

Terkait kewenangan itu, BPK telah menyusun Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D) dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA).

Dalam aturan tersebut dijelaskan, BPK melaksanakan PI guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana dalam lingkup pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pemeriksaan investigasi dapat dilakukan oleh BPK, berdasarkan permintaan dari lembaga perwakilan dan/atau instansi yang berwenang, pengembangan hasil pemeriksaan, atau hasil analisis dan/atau evaluasi atas informasi yang diterima oleh BPK mengenai adanya penyimpangan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif, BPK berwenang meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan investigatif, mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu, dan melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, BPK juga dapat meminta keterangan dan/atau melakukan pemanggilan kepada seseorang, memotret, merekam, dan/atau mengambil bukti yang diperlukan sebagai alat bantu pemeriksaan, menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa dari luar BPK, melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk memperoleh masukan terkait dengan unsur pidana, dan melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dan/atau instansi lain untuk memperoleh bukti pemeriksaan.

BPK kemudian menyusun laporan hasil pemeriksaan investigatif setelah pemeriksaan investigatif selesai dilakukan. Laporan hasil pemeriksaan investigatif bersifat rahasia.

“Apabila dalam pemeriksaan investigatif ditemukan adanya unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang,” ungkap aturan tersebut.

Sementara, terkait penghitungan kerugian negara/daerah, dilakukan melalui pemeriksaan investigatif yang bertujuan untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah termasuk menghitung nilai kerugian negara/daerah yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Penghitungan kerugian negara/daerah dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang.

Dalam beleid tersebut dijelaskan, penghitungan kerugian negara/daerah dilakukan berdasarkan permintaan dari instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang wajib menyediakan dokumen pendukung dalam rangka penghitungan kerugian negara/daerah.

Untuk melaksanakan penghitungan kerugian negara/daerah, BPK memperoleh bukti pemeriksaan melalui instansi yang berwenang. Bukti pemeriksaan dapat pula diperoleh BPK dari pihak lain sesuai kewenangan BPK.

BPK juga dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. Keterangan ahli dilakukan oleh anggota BPK dan/atau pelaksana BPK berdasarkan penugasan BPK.

Keterangan ahli diberikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara/daerah. Dalam hal permintaan pemberian keterangan ahli tidak didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara/daerah, keterangan ahli dapat dipenuhi terkait dengan metodologi dan pengetahuan lain berkaitan dengan pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara/daerah.

“Dalam memberikan keterangan ahli, ahli dapat memperoleh bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” ●

## Pemeriksaan Investigatif

BPK melaksanakan PI guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana dalam lingkup pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

## Penghitungan Kerugian Negara/Daerah

Penghitungan kerugian negara/daerah dilakukan melalui pemeriksaan investigatif yang bertujuan untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah termasuk menghitung nilai kerugian negara/daerah yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Penghitungan kerugian negara/daerah dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang.

## Pemberian Keterangan Ahli

BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. Keterangan ahli dilakukan oleh anggota BPK dan/atau pelaksana BPK berdasarkan penugasan BPK.

### Pemeriksaan investigasi dapat dilakukan oleh BPK berdasarkan:

- Permintaan dari lembaga perwakilan dan/atau instansi yang berwenang;
- Pengembangan hasil pemeriksaan; atau
- Hasil analisis dan/atau evaluasi atas informasi yang diterima oleh BPK mengenai adanya penyimpangan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara.



### Pelaporan dan Penyampaian LHP Investigatif

- BPK menyusun laporan Hasil pemeriksaan investigatif setelah pemeriksaan investigatif selesai dilakukan.
- Laporan hasil pemeriksaan investigatif bersifat rahasia.
- Apabila dalam pemeriksaan investigatif ditemukan adanya unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang.

### Pelaksanaan PKN/D

- Penghitungan kerugian negara/daerah dilakukan berdasarkan permintaan dari instansi yang berwenang.
- Instansi yang berwenang wajib menyediakan dokumen pendukung dalam rangka penghitungan kerugian negara/daerah.
- Untuk melaksanakan penghitungan kerugian negara/daerah, BPK memperoleh bukti pemeriksaan melalui instansi yang berwenang.
- Bukti pemeriksaan dapat pula diperoleh BPK dari pihak lain sesuai kewenangan BPK.



### Pelaporan dan Penyampaian LHP PKN/D

- BPK menyusun laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara/daerah setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- Laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara/daerah bersifat rahasia.
- BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara/daerah kepada instansi yang berwenang.

### Pemberian Keterangan Ahli

- Keterangan ahli diberikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara/daerah.
- Dalam hal permintaan pemberian keterangan ahli tidak didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara/daerah, keterangan ahli dapat dipenuhi terkait dengan metodologi dan pengetahuan lain berkaitan dengan pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara/daerah.
- Dalam memberikan keterangan ahli, ahli dapat memperoleh bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BPK RI memperoleh penghargaan sebagai  
Anggota JDIH Nasional Terbaik I Tahun 2022 kategori lembaga negara.  
Penghargaan diberikan pada Pertemuan Nasional Pengelola JDIH  
dan Pemberian Penghargaan bagi Anggota JDIH Nasional Terbaik Tahun 2022  
di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2022 oleh Menteri Hukum dan HAM.



## PERAN AKUNTAN DALAM SEKTOR PEMERINTAHAN

Akuntan yang bekerja di sektor pemerintahan harus memahami Standar Akuntansi Pemerintahan.



Drazen Zigic - Freepik

**S**eorang akuntan pemerintah memiliki peran vital dalam pengelolaan keuangan negara. Akuntan yang bekerja di sektor pemerintahan pun harus memiliki kompetensi khusus karena ada standar tersendiri.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menjelaskan, akuntan pemerintah merupakan akuntan yang mendedikasikan diri untuk bekerja di sektor pemerintahan. Artinya, seorang akuntan pemerintah mendapat penugasan sebagai alat dari pemerintah untuk mengkomunikasikan kinerja keuangan yang ada di pemerintahan di dalam semua level.

“Jadi sangat penting peran akuntan pemerintah, mulai dari pembukuan, pencatatan, peringkasan, kemudian pelapor-

annya. Itu sangat penting sekali,” kata Agus dalam sebuah wawancara.

Agus menjelaskan, ilmu akuntansi pada dasarnya dibutuhkan apabila suatu entitas akan menyusun laporan keuangan. Begitu juga dengan pemerintah yang membutuhkan kerja seorang akuntan.

“*Levelling* penyusunan laporan keuangan itu bermacam-macam. Biasanya dia di level satuan kerja, kemudian ada laporan keuangan yang harus diterbitkan baik yang parsial. Parsial itu artinya hanya *balance sheet* atau hanya laporan operasional atau laporan realisasi anggaran atau lengkap ditambah dengan laporan arus kas dan juga catatan atas laporan keuangan, serta laporan perubahan ekuitas. Kira-kira ini yang menjadi ruang lingkup kerja daripada akuntan pemerintah,” ucap dia.

Namun di sisi lain, peran akuntan pemerintah juga bisa diperluas dengan menyimpulkan suatu informasi akuntansi. Contohnya, mengukur efektivitas dari penggunaan sumber daya hingga mengukur tingkat keekonomisan penggunaan sumber daya. Hal itu tergantung laporan keuangan yang disusun. Misalnya terkait dengan pengurusan aset serta biaya operasional aset.

“Jadi tidak harus melulu lengkap dalam satu proses penyusunan laporan keuangan, namun lebih kepada kebutuhan itu ada dalam konteks penyusunan laporan keuangan.”

Ia menambahkan, setiap lembaga pemerintah yang menyusun laporan keuangan akan membutuhkan pemahaman akuntan pemerintah. Alasannya, definisi pembahasan akuntansi kas dan aset di pemerintahan, belum tentu sama dengan non-pemerintahan. Ini karena ada perbedaan standar akuntansi yang digunakan. Pemerintah mempunyai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sementara non-pemerintahan memiliki standar yang lain.

Oleh karena itu, tegas Agus, akuntan yang bekerja di sektor pemerintahan harus memahami Standar Akuntansi Pemerintahan. Agus menjelaskan, Standar Akuntansi Pemerintahan sebenarnya hampir sama dengan standar akuntansi pada umumnya. Ada bentuk model pengakuan yang spesifik. Akuntansi keuangan pada umumnya, yang diukur adalah penggunaan *resources* antara *revenue* dan *benefit*. “Kalau akuntansi pemerintahan lebih kepada mengukur bagaimana suatu *resources* dikelompokkan dalam *pooling account* tertentu,” papar dia.

Sebuah standar akuntansi ada yang bertaraf regional dan global. Untuk yang berstandar global, akuntan pemerintah harus memahami International Public Sector Accounting Standard (IPSAS). Agus menegaskan, seorang akuntan yang bekerja di sektor pemerintahan dituntut untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman akuntansinya terhadap standar lokal maupun internasional. Sehingga, ada perbandingan antara la-



■ Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono



**Jangan membandingkan keuangan di Indonesia dengan luar negeri tanpa memahami bentuk akuntansinya dan model standar akuntansinya. Dan ini harus dipahami baik dari level bawah maupun sampai level atas.**

poran keuangan yang ada di Indonesia dengan di negara lain.

Apabila IPSAS tidak benar-benar dijalankan di Indonesia, maka laporan keuangan di Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah sepenuhnya menerapkan IPSAS.

“Contohnya utang di Indonesia jangan dibandingkan dengan utang di luar negeri karena pernyataan standar utang di Indonesia berbeda dengan pernyataan standar di luar negeri. Itu model pemahaman akuntansi dan para akuntan harus paham ini. Jadi jangan membandingkan-bandingkan keuangan di Indonesia dengan luar negeri tanpa memahami bentuk akuntansinya dan model standar akuntansinya. Dan ini harus dipahami baik dari level bawah maupun sampai level atas,” ucap dia.

Dengan kondisi tersebut, akuntan tidak bisa secara sederhana membandingkan utang Indonesia dengan utang Jepang atau Amerika Serikat. Hal ini karena seorang akuntan bukanlah warga awam, yang membaca informasi keuangan dengan sederhana. Informasi seorang akuntan harus spesifik dan informasi akuntansi laporan keuangan sebenarnya tidak disajikan untuk orang yang tidak memahaminya.

yang menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan hingga sistem informasi akuntansi pemerintahan. "Beda dengan swasta, karena swasta menggunakan standar akuntansi keuangan swasta, sistem informasinya pun swasta. Sistem informasi itu kalau di pemerintahan, kita bisa gunakan *fund accounting*, dimana yang kita ukur itu bukan *profit and loss*, tapi bagaimana penggunaan *resources*," ujar dia.



Macrovector - Freepik

Dalam setiap laporan keuangan, akuntan pemerintah tidak bisa melaporkan dan memeriksa angka-angkanya sendiri. Untuk itulah diperlukan akuntan yang bekerja di sektor pemeriksaan publik, seperti BPK, untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang dibuat pemerintah pusat dan daerah.

Agus kembali menekankan, akuntan pemerintah ditugaskan untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan laporan keuangan pemerintahan

Agus menambahkan, ada satu hal lagi yang paling membedakan antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi swasta. Di akuntansi pemerintahan, kata Agus, dikenal dengan *budgetary accounting* karena membukukan atau mengakuntansikan anggaran. Sedangkan swasta jarang yang mengakuntansikan *budget* karena tidak menggunakan *fund accounting*. "Di pemerintahan, ada *budget* yang harus diadministrasikan, sehingga model penjurnalannya pun lain atau sangat berbeda." ●

Majalah bulanan Warta Pemeriksa  
mendapat penghargaan dalam

## The 7th Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2022

Berlangsung di Jawa Tengah,  
pemberian penghargaan  
dilaksanakan pada 25 Maret 2022.



## BPK PAPARKAN PENGALAMAN TINGKATKAN KUALITAS VNR 2021

Wakil Ketua BPK mengimbau agar peserta menjadikan momen ini sebagai titik awal yang baik.

**W**akil Ketua  
Badan  
Pemeriksa  
Keuangan  
(BPK), Agus  
Joko Pramono

memaparkan peran dan pengalaman dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas VNR tahun 2021 sebelum disampaikan kepada HLPF. BPK merupakan *supreme audit institution* (SAI) pertama yang menerapkan reviu atas VNR yang disusun pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Agus saat mewakili Indonesia sebagai pembicara dalam First Global Workshop for the Voluntary National Review (VNR) to be presented at 2023 High-Level Political Forum for Sustainable Development (HLPF). Acara ini diselenggarakan di ILO Training Center, Turin, Italia, pada 6-7 Desember 2022.

Dia menjelaskan, reviu atas VNR tahun 2021 dilakukan melalui mekanisme *hot review*. Yaitu, dilakukan sebelum laporan VNR disampaikan kepada UN HLPF. Reviu tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan INCOSAI XII dan INTOSAI strategic plan 2017-2022.

Ini meliputi, pertama, BPK melakukan penilaian atas kesiapan VNR. Kedua, BPK melakukan audit kinerja terkait dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Ketiga, BPK menilai pelaksanaan SDG 16 dan 17.

Keempat, BPK menjadi model bagi organisasi pemerintah lainnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Antara lain dengan menerbitkan *sustainability report* tahun 2020 dan



■ Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono

melakukan reviu atas VNR tahun 2021.

Menurut Agus, reviu atas VNR berhasil dicapai setelah melalui berbagai tantangan. Tantangan pertama, tidak adanya tolok ukur dari SAI lain, sehingga mendorong BPK untuk *learning by doing*. Kedua, keterbatasan waktu yang mendorong BPK untuk mengoptimalkan penggunaan *big data management and analytics*.

Ketiga, reviu dilakukan sebelum laporan VNR diterbitkan. "Sehingga untuk mendapatkan dukungan pemerintah, BPK secara intensif berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan reviu atas VNR dan laporan VNR selesai tepat waktu serta untuk memitigasi risiko validitas data," papar Agus.

Pada kesempatan itu, Agus juga memaparkan mengenai faktor yang menjadi kunci keberhasilan reviu atas VNR. Hal ini antara lain, pertama, BPK melakukan perencanaan audit atas SDG sebelum melakukan reviu. Ini dilakukan untuk dapat menentukan area-area yang akan menjadi fokus.



Kedua, adanya kerangka dan kriteria yang disepakati antara pemerintah dan BPK untuk mengatasi timbulnya resistensi selama proses reuiu. Ketiga, terbangunnya *awareness* bersama untuk memiliki VNR yang komprehensif, berkualitas, dan berbasis bukti. Faktor keempat, penting bagi SAI untuk melakukan audit SDGs dalam rangka memperkuat pemantauan dan evaluasi implementasi SDGs.

*"This is not the end. Even this is not the beginning of the end, but this is the end of the beginning,"* ungkap Agus ketika menutup paparan.

Dia pun mengimbau agar peserta menjadikan momen ini sebagai titik awal yang baik. Yaitu, untuk saling berbagi pengalaman dan saling bekerja sama antar-*stakeholders* dan antarnegara untuk menjadikan bumi yang ramah bagi generasi saat ini dan yang akan datang.

Pada kesempatan itu, Agus memenuhi undangan sebagai pembicara

di sela kegiatannya menghadiri pertemuan tahunan United Nations (UN) Independent Advisory Audit Committee (IAAC) di New York, Amerika Serikat. UN Development Economic and Social Affairs (UN DESA) menyelenggarakan *first global workshop for the VNR* ini secara hibrida untuk mengumpulkan informasi dari negara-negara peserta HLPF yang berpartisipasi melakukan VNR pada 2023. VNR pada prinsipnya menggambarkan pencapaian suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Acara yang dibuka oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (United Nations Economic and Social Council/ECOSOC) ini bertujuan untuk memfasilitasi peserta dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan VNR. Termasuk mengenai keberhasilan, tantangan, dan *lessons learned* dalam rangka mempercepat pencapaian agenda 2030. Tercatat sebanyak 42 negara peserta yang mengikuti forum ini. ●



***This is not the end. Even this is not the beginning of the end, but this is the end of the beginning.***

## WAKIL KETUA BPK HADIRI PERTEMUAN UN IAAC KE-60 DI NEW YORK

Salah satu laporan yang disampaikan executive secretary kepada komite adalah terkait IAAC Annual Report periode 1 Agustus 2021-31 Juli 2022.



**W**akil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agus Joko Pramono menghadiri pertemuan United Nations Independent Audit Advisory Committee (IAAC) ke-60 di New York, Amerika Serikat, Kamis (8/12). Kehadiran ini terkait kapasitas Agus sebagai Vice Chair of the United Nations IAAC.

The 60th Session of the UN IAAC diselenggarakan di Markas Besar PBB (UN Headquarters), New York. Hadir dalam pertemuan tersebut chair, Janet St Laurent (Amerika Serikat) dan anggota IAAC lainnya. Seperti Dorothy A Bradley (Belize), Imran Vanker (Afrika Selatan), serta Anton V Kosyanenko (Rusia).

Pertemuan ini diawali dengan penyampaian laporan dari executive secretary kepada komite. Laporan antara lain terkait dengan IAAC Annual Report periode 1 Agustus 2021-31 Juli 2022. Kemudian Statement on Internal Control (SIC) 2021 dan pengantar laporan IAAC kepada Administrative and Budgetary Committee.

Sesi tersebut kemudian diikuti pertemuan dengan Under Secretary-General

(USG)-Office of Internal Oversight Services (OIOS), Fatoumata Ndiaye dan Controller/Assistant Secretary-General (ASG), Chandramouli Ramanathan.

Pertemuan dengan Ndiaye membahas mengenai isu manajemen OIOS. Misalnya saja, rencana kerja dan anggaran dalam kegiatan pengawasan OIOS terhadap misi perdamaian (*peacekeeping*) dan kebutuhan sumber daya manusianya. Kemudian, hasil pelaksanaan *external quality assessments* untuk Divisi Investigasi dan isu-isu penting lain yang menjadi perhatian IAAC.

Sementara, pertemuan dengan Ramanathan, Agus membahas mengenai revidi General Assembly dan Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ) terhadap anggaran yang diusulkan oleh OIOS. Kemudian, Statement of Internal Control (SIC), situasi finansial yang dihadapi UN, serta Capital Investment Plan terkait dengan *ICT, cyber security, safety and security capabilities*, dan *building and facilities management*.

Pertemuan ini ditutup dengan rekomendasi yang akan diusulkan oleh IAAC kepada Sekretaris Jenderal PBB. ●

## MEMAPARKAN SEMBILAN NILAI ANTIKORUPSI

Kolaborasi dengan BPK juga diperlukan contohnya mengenai reformasi birokrasi.

**P**erilaku antikorupsi dan *antifraud* diayakini merupakan buah dari suatu pohon yakni integritas. Hal itu diyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyusun edukasi mengenai perilaku antikorupsi ke seluruh Indonesia.

“Kalau kita mau membangun generasi manusia atau individu yang antikorupsi itu harus bangun pohon yang namanya pohon integritas,” ungkap Direktur Kampanye dan Sosialisasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Amir Arief kepada *Warta Pemeriksa*.

Untuk membangun pohon integritas tersebut, ujar Amir, diperlukan benih-benih prasyarat. Hal itu kemudian dirumuskan oleh KPK dalam sembilan nilai yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Nilai-nilai itu disingkat menjadi ‘Jumat Bersepeda KK’.

Penentuan nilai-nilai itu merupakan hasil kajian KPK, berdasarkan fakta di lapangan, serta masukan dari beberapa pakar pendidikan. “Sehingga, akhirnya kita merasa perlu merumuskan nilai-nilai yang cocok jadi prasyarat untuk membangun manusia atau individu dari anak usia kecil sampai *senior citizen*,” ujarnya.

Menurut Amir, nilai paling dasar adalah kejujuran. Dia menekankan, jujur adalah nilai yang bersifat universal. Kesesuaian antara lisan, perbuatan, dan akal menjadi sebuah syarat utama dalam membangun perilaku antikorupsi.

Meski begitu, Amir mengatakan, upaya menumbuhkan integritas tidak hanya bicara soal kejujuran tapi juga mengenai nilai-nilai lain seperti peduli dan adil.

Ini adalah nilai dasar untuk mendidik generasi muda hingga lansia dalam memiliki perilaku antikorupsi.

Sama seperti menanamkan gagasan apapun, Amir menyampaikan, diperlukan komunikasi yang efektif kepada sasaran. Terdapat dua pendekatan yang dilakukan KPK yakni *below the line* dan *above the line*.

Dia menekankan, strategi komunikasi *above the line* meliputi metode penyebaran komunikasi

secara massal. Contohnya, pasang pesan di baliho, media massa, videotron, dan lain-lain.

“Itu gunanya supaya orang sadar bahwa ada pesan tersebut. Orang sadar dulu bahwa ada pesan antikorupsi, ada pesan untuk hidup berintegritas,” ujarnya.

Kemudian, strategi *below the line* mengusung pendekatan *person to person*. Strategi ini mengedepankan pertemuan tatap muka, bimbingan teknis, maupun forum.

“Kami bertemu masyarakat untuk bersama berkolaborasi. Dalam tahap ini kita mengubah *awareness* menjadi *action* atau aksi,” kata Amir.

Dari kampanye antikorupsi tersebut, KPK memiliki tujuan akhir yakni indikator sasaran strategis yang diukur melalui Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

IPAK adalah angka yang diperoleh dari survei yang dilakukan BPS setiap tahun. BPS mengukurnya dari ribuan responden.

“Pertanyaan-pertanyaannya seperti, apakah pernah menerima hadiah atau serangan fajar saat dilakukan pilkada atau pilkades? Apakah anda menilai hal itu wajar? Ada juga pertanyaan untuk ibu rumah tangga. Kalau suami anda penghasilan sekian tapi dalam suatu hari bawa uang lebih bagaimana pendapat anda?” ungkap Amir.

Indeks tersebut disajikan dalam angka 0 hingga 5. Amanat renstra KPK dan RPJMN adalah untuk menembus level 4.

“Saat ini sudah terus membaik walau belum menembus level indeks 4. Pada 2022 itu, IPAK kita 3,93,” ujarnya.

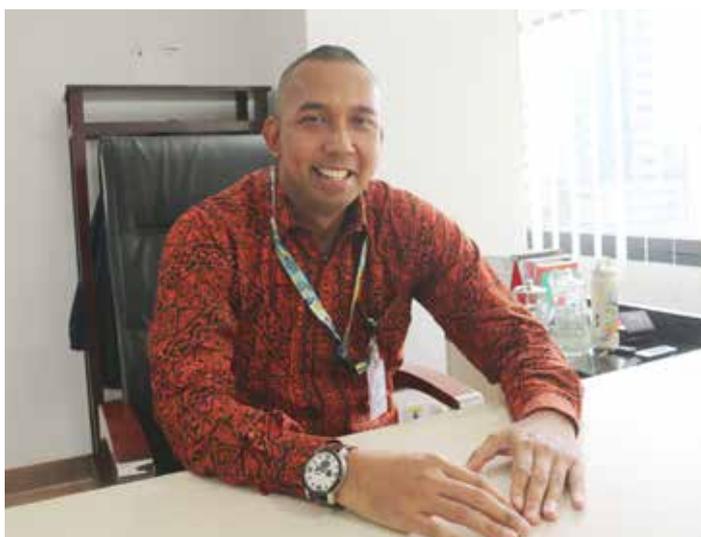
Dari pengukuran BPS tersebut, KPK menemukan, masyarakat yang masih permisif terhadap perilaku korupsi. Contohnya, di perdesaan ternyata persepsi antikorupsinya masih lebih rendah dibanding perkotaan.

“Hal itu menjadi parameter kita dalam kampanye antikorupsi,” ujar Amir.

KPK memanfaatkan IPAK untuk menentukan pola kampanye nilai antikorupsi. Misalnya, karena dalam data IPAK disebutkan persepsi antikorupsi di perdesaan masih rendah, maka KPK mencoba untuk melakukan kampanye lewat sinetron di jam *primetime*.



**Kita edukasi ke masyarakat untuk tidak memilih kandidat yang menggunakan serangan fajar atau *money politic*. Dan ternyata ini didukung juga oleh politisi.**



■ Amir Arief

“Kita sisipkan pesan-pesan antikorupsi dalam dialog sinetron tersebut,” ujarnya.

Berbeda halnya dengan strategi untuk anak-anak generasi muda. Dia mengatakan, kampanye melalui media sosial dinilai lebih efektif seperti *Youtube*.

Amir menyampaikan, target KPK dalam setiap tahun yakni memaparkan nilai-nilai anti-korupsi kepada 12 juta orang melalui berbagai media. Untuk tahun ini, ujarnya, sudah terealisasi jangkauan sebanyak 20 juta penonton.

Amir mengatakan, sembilan nilai antikorupsi KPK relevan dengan semua isu terkait korupsi. Meski begitu, KPK berupaya masuk ke lima sektor prioritas pencegahan korupsi di KPK. Hal itu mengenai pengelolaan sumber daya alam, penegakan hukum, tata kelola keuangan dan bisnis, politik, dan perizinan.

“Isu kita pada tahun ini, karena semakin dekat dengan tahun politik, maka banyak kita sampaikan tema-tema terkait politik,” ujarnya.

Selain itu, ujarnya, persoalan perizinan juga menjadi sorotan. Menurutnya, di beberapa tempat masih ditemukan kasus pengurusan perizinan membutuhkan uang pelicin.

“Ini juga kalau di daerah yang IPAK-nya rendah, kemudian kita rasa perlu diintervensi maka kita pasang kampanye terkait hal itu,” ujarnya.

Dalam proses sosialisasi, Amir mengaku terdapat tantangan yang beragam. Menurutnya, ada dinamika tersebut dalam upaya melakukan sosialisasi antikorupsi jelang tahun politik.

“Kita edukasi ke masyarakat untuk tidak memilih kandidat yang menggunakan serangan fajar atau *money politic*. Dan ternyata ini didukung juga oleh politisi,” ujarnya.

Ada juga edukasi KPK ke pejabat eselon I, menteri, termasuk pasangannya. Akan tetapi, pembekalan mengenai antikorupsi kepada kelompok tersebut mengusung pendekatan yang berbeda

“Tidak dengan menggurui tapi lebih kita sentuh sisi spiritualnya,” ujarnya.

Amir menekankan, pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilakukan terpadu dengan pendekatan trisula. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk memberantas kejahatan apapun mulai dari kejahatan jalanan.

Pendekatan pertama, ujarnya, adalah pendidikan. KPK perlu mengedukasi individu untuk tahu kejahatan korupsi, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh.

Kedua, pencegahan. Pendekatan itu berupaya memperbaiki tata kelola serta ekosistem di setiap instansi. “Sehingga, orang yang tadinya tidak mau juga semakin tidak leluasa untuk berbuat kejahatan. Jadi, celah-celahnya untuk melakukan kejahatan diperketat,” ujarnya.

Ketiga, penindakan. Menurutnya, perlu ada *repressive law enforcement* atau hukuman yang membuat jera supaya mereka takut melakukan korupsi.

Amir menegaskan, ketiga hal tersebut harus terpadu. Kolaborasi dengan BPK juga diperlukan contohnya mengenai reformasi birokrasi. BPK sebagai pengawas eksternal dinilai bisa menjadi jumentik. Sehingga, ketika melihat jentik-jentik korupsi harus segera ditutup dan dibersihkan.

IPAK menjadi bahan penting dalam analisis kampanye antikorupsi KPK ke depan. Amir mengatakan, temuan mengenai masyarakat yang masih permisif terhadap *money politics* akan menjadi sorotan. Hal ini terutama semakin dekatnya tahun politik.

“Kita menyoroti beberapa provinsi yang nilai IPAK-nya masih rendah. Inisiatif kita tahun depan, kawasan tersebut akan kita intensifkan edukasi,” ujarnya. ●

## KOMUNITAS MC: SUKA DUKA PARA PEMBUKA ACARA SEREMONIAL BPK

Walaupun melakukan kesalahan, MC tetap harus percaya diri dan tenang.

**D**alam sebuah event ataupun acara, seberapa besar atau kecilnya gelaran tersebut, selalu ada orang-orang yang hadir dibelakangnya. Tidak hanya orang-orang dibelakangnya, gelaran event ataupun acara juga menghadirkan seseorang didepannya. Dia adalah MC atau *master of ceremony*, orang yang selalu membuka dan menutup sebuah acara.

Begitu juga di Badan Pemeriksa Keuangan, selalu ada MC yang hadir dalam setiap acara baik itu di level satuan kerja hingga melibatkan Anggota BPK. Mungkin Anda mengenal wajah-wajahnya hanya saja menurut *Warta Pemeriksa* Anda juga perlu tahu nama-nama mereka seperti, Rian Ismaya Pirony (Pranata Komputer Ahli Muda Bagian Operasional Teknologi Informasi Biro Teknologi Informasi), Ruth Indirayani Manurung (Kepala Subbagian Layanan Informasi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional), Risma Nurismayanti (Pranata Hubungan Masyarakat Muda Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional), Sylvia Ika Oktavi (Analisis Kerja Sama Luar Negeri staf Subbagian INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI) dan Radhika Wisudaniar (Pengelola Data Layanan Informasi dan Edukasi Publik Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional).

Lalu bagaimana kelimanya bisa menjadi MC dalam berbagai acara Badan Pemeriksa Keuangan, bahkan hingga event-event milik BPK Perwakilan? Hampir kelimanya menyebut 'tercebur' atau isitilah salah satu MC Rian Ismaya Pirony, 'dijeburin'. Ia mengaku awalnya diajak tampil langsung dalam pelantikan, walau bukan MC namun sebagai pembaca surat keterangan. Hingga lanjut kemudian menjadi pendamping MC dalam acara informal yaitu pertandingan olahraga tenis.

Posisinya pun lama-lama bergeser sebagai MC dalam acara formal walaupun saat itu pesertanya bukan pejabat, yaitu dalam acara penerimaan kunjungan mahasiswa di BPK. Barulah kemudian ia didapuk menjadi MC dan mendapat pelatihan khusus sebagai MC.



■ Ruth Indirayani Manurung

Sementara bagi Ruth Indirayani Manurung (Uthe), latar belakangnya yang pernah bekerja di bidang *event organizer* yang kemudian mendorong ia didapuk menjadi MC. Ia yang kala itu sebagai staf subbagian Hukum dan Humas BPK Perwakilan, diminta menjadi MC dalam ajang yang tidak resmi di Kantor Perwakilan. Berkat kemampuannya, ia pun kemudian ditugaskan ke BPK Pusat dan wajahnya pun sering kali wara-wiri dalam berbagai acara BPK, baik level nasional hingga internasional.

Sementara itu, pengalaman Sylvia, hanya diminta membuat skrip MC untuk kegiatan internasional BPK yang diadakan di Indonesia. Skrip ini untuk membantu petugas MC di acara-acara seremonial seperti upacara pembukaan atau penutupan.

Akan tetapi karena keterbatasan personil MC di tengah banyaknya permintaan kegiatan, suatu hari di tahun 2016, ia diminta membantu menjadi MC untuk kegiatan Diskusi Eksekutif antara BPK Indonesia dan BPK Australia.

"Sejak saat itu, saya makin sering diminta jadi MC untuk kegiatan-kegiatan BPK yang berbahasa Inggris," ucap dia.

Walau sebenarnya, tutur Sylvia, pengalaman yang membentuk spesialisasinya sebagai MC sangat sempit, yaitu acara seremonial yang berbahasa Inggris. "Biasanya acara ini mencakup *opening ceremony*, *closing ceremony*, dan *official dinner*. Namun, pada perkembangannya, ada juga acara *welcome cocktail*, *farewell dinner*,



■ Rian Ismaya Pirony

atau penanaman pohon, tergantung pada kebutuhan dan desain kegiatan,” tutur dia.

Sementara Uthe mengakui beberapa tahun belakangan ia sering kali sendirian mendapat tugas menjadi MC alasannya tentu saja seperti Rian dan Risma yang sudah berpindah satuan kerja. Apalagi penunjukan MC, Uthe menyebut berdasarkan permintaan satuan kerja terkait atau arahan dari atasan.

Walau kini Uthe akhirnya bisa bernapas lega karena, sudah ada Radhika Wisudaniar yang kadang menggantikan posisinya sebagai MC dalam kegiatan BPK. Lalu bagaimana dengan Radhika sendiri?

Radhika mengaku sebelumnya sering ditugaskan menjadi MC untuk acara-acara yang diselenggarakan oleh satuan kerja. Kesempatan pun akhirnya datang saat Radhika mulai mengikuti Diklat Excellent MC. Saat itu, ia mengaku menyetujui komitmen untuk melaksanakan penugasan MC pada acara yang dihadiri oleh Pimpinan BPK. Setelahnya, ia mengaku sering mendapatkan penugasan terutama setelah berpindah ke Humas KSI, dan dengan begitu jadi semakin sering ditugaskan di acara-acara BPK.

### Kejadian tak terlupakan

Soal Pengalaman menjadi MC tentu memiliki suka dan duka, apalagi sering kali mereka mengikuti kegiatan Ketua dan Anggota BPK. Rian misalnya menceritakan pengalaman pertama MC tunggal untuk menerima kunjungan mahasiswa. Karena grogi, ia menyebut UNS beserta kepanjangannya yang ternyata salah.

“UNS atau Universitas Negeri Solo, kedua saya sebut UNS Universitas Negeri Surakarta yang malah disorakin mahasiswa. Akhirnya sambil

pura-pura percaya diri dan cengar-cengir bilang kalau sengaja salah, untuk ngetes apakah para mahasiswa memperhatikan MC. Dan untuk yg ketiga kali baru betul beneran,” ucap dia.

Selain itu yang tidak terlupakan MC event internasional besar, yaitu ASEANSAI. Mulai dari event penandatanganan MOU sampai jamuan makan malam resmi. Menjadi MC juga menjadi salah satu tugas sebagai delegasi pada acara di luar negeri, yang waktu itu menjadi MC bersama dengan SAI Malaysia untuk acara di Malaysia. Dan tentunya juga yang tidak terlupakan MC untuk event pernikahan putra-putri pimpinan BPK mulai pengajian, akad sampai resepsi.

Sementara Risma, misalnya mendapat pengalaman pahit karena ditegur oleh Anggota BPK karena salah menyebutkan nama pejabat yang datang. Sebenarnya ia tidak salah menyebut nama, hanya saja sang pejabat memang belum hadir. Walau begitu, sebagai MC, menurut Risma walaupun salah tetap harus memperlihatkan kepercayaan diri.

MC, menurut Risma juga harus selalu awas dengan kondisi yang terjadi pada saat pembukaan hingga akhir penutupan. Makanya, menurut Risma yang juga diamini Uthe, pantang bagi MC memainkan ponsel saat mengikuti acara. “MC juga harus siap jam berapapun bila harus mengikuti gladi resik sebelum acara dimulai keesokan harinya,” papar dia.

Sementara bagi Sylvia, pengalaman paling berkesan adalah launching Ceremony of ASEANSAI Secretariat Office di Jakarta. Ketika itu ada pemerintaan dari Wakil Ketua BPK kala itu untuk diselipkan informasi tentang anggrek bulan yang sengaja disiapkan beberapa pot untuk acara di auditorium. Sebagai MC, harus siaga mencari makna dan mengaitkannya dengan ASEANSAI.



■ Risma Nurismayanti



■ Radhika Wisudaniar

Masih di rangkaian kegiatan yang sama, mata acara kedua adalah pemotongan bunga/*ribbon cutting ceremony* di depan Ruang Sekretariat ASEANSAL. Selain harus segera lari dari auditorium lantai 2 ke lantai 1 untuk bersiap-siap, acara ini belum pernah dilakukan sebelumnya, apalagi dalam Bahasa Inggris.

"Jadi waktu itu harus memutar otak dan mencari referensi sebanyak-banyaknya dalam membuat naskah MC dan merancang skenario acaranya. Sebagai penutup acara, diselenggarakan Official Dinner di Hotel Fairmont pada malam harinya. Kala itu pertama kalinya saya sebagai MC memberanikan diri memakai kebaya, karena ada unsur pagelaran budaya dalam acara jamuan tersebut," tutur Sylvia.

Sedangkan untuk pengalaman paling segar diingatan tentu saja dipercaya menjadi MC di awal rangkaian acara SAI20 tahun 2022. Dimulai dari Technical Meeting, Seminar, sam-

pai ke Senior Official's Meeting. "Untuk MC SAI20 Summit, memang saya yang minta untuk memakai MC profesional, bahkan mencarikan MC yang adalah kenalan saya. Pertemuan yang hybrid menjadi tantangan, dan format kegiatan di bawah G20 menjadi pencapaian tersendiri dalam "karir" per-MC-an saya," ucap Sylvia.

Kegiatan yang padat juga kadang membuat MC jadi harus memprioritaskan tugas tersebut dibandingkan pekerjaan lain di BPK. Radhika, misalnya, mengakui tugas MC sangat menyita perhatian sehingga jika tidak mengatur waktu dengan baik, dapat mengakibatkan pekerjaan rutin terbengkalai. Untuk itu ia berusaha untuk dapat tetap mengerjakan pekerjaan rutin di sela-sela penugasan MC.

"Bahkan terkadang dapat saya kerjakan sembari bertugas sebagai MC, dengan cara membuka laptop saat acara sedang dipegang oleh moderator, misalnya," tutur dia. ●



■ Sylvia

## Tip Menjadi MC

**B**agi Anda insan BPK yang ingin menjadi pembawa acara tiap gelaran BPK, teman-teman MC membagikan beberapa saran. Seperti Uthe misalnya menyebut mengikuti diklat MC mungkin akan memberi gambaran yang lebih jelas bagi teman-teman, dan berlatih di depan cermin bisa membantu sebagian orang. Namun menurut dia latihan menjadi MC yang paling jitu adalah dengerterjun dan praktik langsung.

"Karena dengan cara itulah teman-teman akan ditempa untuk mengelola semua informasi dan hal yang sudah didengar dan dipelajari, untuk dipraktikkan dengan riil," ucap dia.

"Pasti akan ada sedikit kesalahan di sana-sini, tetapi hal itu lumrah sebagai bagian dari proses

pembelajaran. Pada akhirnya, memang jam terbang seorang MC akan mempengaruhi kedewasaan dan ketenangan dalam menghadapi sebuah krisis, ketika semua mata masih tertuju pada MC," ucap dia melanjutkan.

Setali tiga uang, Rian dan Risma mengingatkan bahwa terjun dan sering berlatih lewat membawakan acara akan membuat Anda terbiasa menjadi MC. Selain itu juga banyak juga belajar dari orang lain dan event lain. Jaga kesehatan suara dengan konsumsi makanan yang baik. Dan yang paling penting banyak berdoa agar dimudahkan dan diberikan ketenangan.

"Yakin kepada diri sendiri bahwa acaranya *gak* akan mulai sebelum dibuka MC. Jadi ketenangan MC adalah kunci," ungkap Rian. ●

## PENGHAPUSAN HONORER DAN PERAN PPPK DALAM SISTEM KEPEGAWAIAN BPK

Pada tahun lalu, BPK mendapatkan formasi 107 orang PPPK.



■ Gunarwanto

**K**ementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan menghapus tenaga honorer di instansi atau lembaga pemerintahan mulai 28 November 2023.

Hal ini tertuang dalam dalam Surat Menteri PAN-RB Nomor B/165/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Lewat kebijakan ini, Pemerintah memastikan akan menghapus sekitar 400 ribu tenaga honorer yang sebagian besar berasal dari sektor pendidikan. Tidak hanya di sektor pendidikan, honorer juga akan dihapus di seluruh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

Kebijakan peralihan sistem kepegawaian dari honorer ke PPPK itu mulai dijalankan di BPK. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) BPK Gunarwanto menjelaskan, struktur kepegawaian di BPK saat ini terdiri atas

Aparatur Sipil Negara/ASN (meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional) dan Non Aparatur Sipil Negara atau Tenaga Tidak Tetap (TTT) yang disebut honorer.

Sementara itu, jumlah Pegawai BPK per 1 November 2022 sebanyak 9.811 orang, terdiri atas PNS sebanyak 8.422 orang (85,84 persen) dan TTT sebanyak 1.389 orang (14,16 persen).

Gunarwanto mengakui, Penghapusan tenaga honorer atau TTT merupakan konsekuensi logis dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang merupakan produk bersama antara Pemerintah dan DPR.

Berdasarkan UU ASN, pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah atau yang disebut sebagai Pegawai ASN ditetapkan menjadi PNS dan PPPK. Status tenaga honorer atau TTT akan dihapus dan dialihkan menggunakan mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) dan/atau bagi yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti seleksi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Namun, perlu diingat bahwa pengadaan PPPK dan CPNS didasarkan pada sistem merit dan terbuka untuk semua kalangan yang memenuhi persyaratan. Kami harapkan agar para TTT yang akan mengikuti seleksi Pengadaan PPPK dan CPNS untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam melalui setiap tahapan seleksi yang ada," kata Gunarwanto kepada *Warta Pemeriksa*.

BPK telah memiliki strategi transformasi, yaitu mengimbuai TTT di BPK yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan PPPK. Pada tahun lalu, BPK mendapatkan formasi 107 orang PPPK. Dari jumlah itu, jumlah arsiparis ahli pertama yang menjadi PPPK sebanyak 58 orang. Selanjutnya adalah Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama dan Pranata Komputer Ahli Pertama.

Sementara itu, sesuai PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, apabila ada pegawai TTT yang tidak lolos PPPK, akan dialihkan menggunakan mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ). “BPK masih menunggu kebijakan dan mekanisme peralihan ini secara nasional,” ungkap dia.

### Peran PPPK

Gunarwanto menjelaskan, PPPK sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

“Memenuhi syarat tertentu disini maksudnya adalah orang yang telah memiliki pengalaman untuk menduduki jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah, sehingga pada saat dinyatakan lulus seleksi maka PPPK tersebut sudah siap untuk bekerja,” ucap dia.

Disitulah perbedaan utama antara PPPK dan PNS secara umum. “Setelah lulus seleksi, PPPK diharapkan dapat langsung bekerja berdasarkan pengalaman jabatannya. Berbeda dengan CPNS yang masih harus melalui proses Diklat dan masa percobaan selama satu tahun,” kata Gunarwanto.

Ke depannya, ungkap dia, sesuai arahan Kemenpan-RB, pegawai BPK akan terdiri atas PNS dan PPPK. Di masa yang akan datang, arah dari kebijakan SDM secara nasional adalah mempekerjakan pegawai dengan efisien dan efektif.

Jabatan-jabatan yang bersifat permanen akan diisi PNS yang memiliki masa kerja sampai dengan usia pensiun, sedangkan jabatan yang sifatnya temporer atau diperlukan hanya untuk periode tertentu akan diisi oleh PPPK.

Dengan demikian, PPPK akan direkrut hanya pada saat diperlukan dan setelah habis masa perjanjian dapat diputus atau tidak diperpanjang apabila suatu pekerjaan/proyek telah selesai dilaksanakan, namun juga dapat diperpanjang apabila Instansi masih membutuhkan keahlian PPPK tersebut.

“Jadi PPPK ini penting untuk mengisi jabat-

an yang kegiatannya bersifat temporer/*project*. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 disebutkan bahwa Jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK adalah Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT),” ujar dia.

Kebijakan lowongan jabatan yang dapat dibuka oleh Instansi Pemerintah ditetapkan oleh Menpan-RB. Pada 2022, misalnya, Menpan-RB hanya membuka lowongan PPPK untuk JF Ahli Pertama dan JF Keterampilan.

Dia menambahkan, Biro SDM pada dasarnya melaksanakan fungsi pendukung yang mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan praktik-praktik pengelolaan SDM yang profesional. Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan SDM di BPK diupayakan selaras dengan visi, misi, dan strategi BPK.

Berdasarkan Rencana Strategis BPK 2020-2024, faktor-faktor yang mempengaruhi BPK di masa mendatang, antara lain, terdiri atas model kematangan lembaga pemeriksa, analitik data besar (*big data analytics*), dan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) berdasarkan sistem merit dan nilai nilai dasar BPK, yaitu inte-

gritas, independensi dan profesionalisme.

Sehubungan dengan hal tersebut, praktik-praktik pengelolaan SDM di BPK, mulai dari rekrutmen sampai dengan pemberhentian, antara lain diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan yang berkaitan dengan faktor-faktor tersebut.

Selain untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, praktik pengelolaan SDM di BPK dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Manajemen ASN.

Atas alasan itu pula, Rencana Strategis Biro SDM Periode 2020-2024 memfokuskan pada pemenuhan aspek-aspek sistem merit yang dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan pegawai berdasarkan formasi jabatan; pemenuhan penempatan pegawai dan jabatan sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja; pemenuhan pola karier yang berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja; dan pemenuhan penghitungan tunjangan kinerja yang mempertimbangkan kinerja individu. ●



Setelah lulus seleksi, PPPK diharapkan dapat langsung bekerja berdasarkan pengalaman jabatannya.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)  
meraih penghargaan dalam

## **The 7th Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2022**

**Sebagai Lembaga Terpopuler di Media Cetak Tahun 2021**

Pemberian penghargaan dilaksanakan di Jawa Tengah pada 25 Maret 2022.



## PEMERIKSA DIHARAPKAN BERIKAN HASIL YANG BERKUALITAS DAN BERMANFAAT

Kaditama Revbang menjelaskan mengenai mekanisme penyajian hasil pemeriksaan tematik dalam IHPS.



■ Nyoman Adhi Suryadnyana

**P**ara pemeriksa diharapkan dapat merumuskan suatu pandangan atau pemeriksaan yang dapat memberikan hasil yang berkualitas. Tak hanya itu, akan tetapi juga dampak yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

“Harapan saya adalah pelaksanaan pemeriksaan ini berjalan dengan baik, menghasilkan *outcome* yang bagus, yang dapat memberikan dampak yang signifikan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah,” ujar Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana di auditorium kantor pusat BPK, Jakarta, Rabu (21/12).

Nyoman menyampaikan hal itu terkait dengan pelaksanaan konsinyering penyusunan ikhtisar hasil pemeriksaan (IHP) atas pelaksanaan pemeriksaan Prioritas Nasional 7 tahun 2022 yang diselenggarakan BPK, Rabu. Acara itu bertujuan untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang berkualitas.

Dia juga berharap para pemeriksa dapat mengawasi dan memastikan pemerintah menjalankan rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK. “Hal terpenting dalam suatu pemeriksaan, selain dari pelaksanaan pemeriksaan dan merumuskan hasilnya, adalah pemantauannya. Bagaimana kita mengawasinya, kemudian bagaimana kita memastikan pemerintah melak-

sanakan apa yang menjadi rekomendasi kita,” ungkap Nyoman.

Dalam arahnya, Nyoman juga memaparkan bahwa pemeriksaan tematik PN 7 merupakan pemeriksaan yang dilakukan guna mendukung program kerja pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah satu program tersebut adalah memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan (polhukam), serta transformasi pelayanan publik.

“BPK sebagai lembaga negara yang diberi tugas dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, tentunya merupakan bagian yang sangat penting yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan kegiatan program nasional ini,” kata dia.

Kegiatan konsinyering dilaksanakan selama tiga hari, yaitu 21-23 Desember 2022. Acara diisi dengan paparan Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan (Kaditama Revbang) Bernardus Dwita Pradana. Pada kesempatan itu, Dwita menjelaskan mengenai mekanisme penyajian hasil pemeriksaan tematik dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Selanjutnya, konsinyering dilanjutkan dengan paparan panel dari masing-masing ketua tim pemeriksa. ●





## 4 SATKER BPK RAIH PREDIKAT WBBM

Pencapaian predikat dalam pembangunan zona integritas merupakan bukti komitmen BPK dalam mewujudkan tujuan reformasi birokrasi.

**M**enjelang akhir tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali meraih penghargaan. Kali ini, BPK mendapat 4 predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI).

Penghargaan ini diraih oleh satuan kerja (satker) Auditorat Utama Investigasi, BPK Perwakilan Provinsi Jambi, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, dan BPK Perwakilan Provinsi Riau. Dengan demikian, sampai dengan 2022, ini BPK telah memiliki tujuh satker yang berpredikat WBBM.

Penghargaan dengan predikat WBBM merupakan penghargaan tertinggi dalam program pembangunan zona integritas. Untuk dapat memperoleh predikat tersebut, satker harus mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) terlebih dahulu dan melalui serangkaian penilaian. Baik penilaian internal oleh Inspektorat Utama BPK maupun penilaian oleh tim penilai nasional Kementerian PANRB.

Penghargaan Pembangunan ZI tahun 2022 diselenggarakan oleh Kementerian PANRB, di Jakarta, Selasa (6/12). Pada kesempatan ini, Auditorat Utama Investigasi diwakili oleh Kepala Auditorat Investigasi Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan, Hasby Ashidiqi. Dia menerima secara langsung penghargaan Pembangunan ZI Predikat WBBM yang diserahkan oleh Menteri PANRB, Abdullah Azwar Annas. Sementara itu, tiga satker BPK lainnya menghadiri acara penghargaan secara daring.

Pencapaian predikat dalam pembangunan zona integritas merupakan bukti komitmen BPK dalam mewujudkan tujuan reformasi birokrasi. Tujuan tersebut yaitu mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi serta berorientasi kepada pelayanan publik.

Satker yang telah mendapatkan predikat pembangunan zona integritas diharapkan dapat menjadi teladan atau *role model* bagi satker lainnya. Khususnya dalam pengelolaan tata kelola organisasi dan reformasi birokrasi yang lebih baik. Baik di internal BPK maupun eksternal BPK. ●



BPK menerima Penghargaan **Bronze Winner** untuk **Kategori Kanal Digital Subkategori Aplikasi** pada ajang **Anugerah Humas Indonesia 2022** yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2022 di Malang.

**HUMAS**  
**INDONESIA**



## EDUKASI ANTIKORUPSI BAGI ANAK-ANAK, PENTINGKAH?

■ OLEH SIGIT RAIS,  
ANALIS PUBLIKASI BIRO HUMAS DAN KSI BPK

Seperti parasit yang terus bertengger di permukaan kulit, begitu sulit diberantas. Tak hanya di lingkungan instansi pemerintahan yang selama ini marak diberitakan, perilaku koruptif sebetulnya ada di detail keseharian masyarakat kita.



Setiap hari, tak hentinya kita menyimak berita tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh berbagai kalangan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak-pihak berwenang, untuk memberantas perilaku koruptif yang sangat mengakar di Indonesia. Namun, pada kenyataannya, korupsi masih tetap ada.

Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, atau lebih umum, degradasi atau deformasi dari tatanan politik, telah ada sejak awal pendirian negara (Sampson, 2015). Perilaku koruptif ini disebabkan oleh adanya keserakahan dan ketamakan. Selain itu, korupsi juga lahir dari perbuatan tidak jujur.

Dalam suatu negara, perbuatan koruptif pada administrasi publik dapat mengganggu perekonomian. Hal ini membuat pemerintahan tidak efisien, tidak kompetitif, mencegah perkembangan yang intensif dan inovatif dari suatu negara, menyebabkan penurunan tajam dalam standar hidup, menciptakan nihilisme hukum yang besar, sinisme dan bentuk ekstrim dari umum, apatis, dan bentuk-bentuk citra negatif suatu negara (Botnev, 2014).

Pada tahun 2021, dilansir dari web *transparency.org*, Indonesia menempati urutan ke-96 dari 180 negara, dengan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*) mencapai 38 poin. CPI tersebut menunjukkan urutan peringkat dari 180 negara di seluruh

dunia berdasarkan persepsi tingkat korupsi sektor publik. Hasilnya diberikan dalam skala dari 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan peringkat saja dibandingkan dengan capaian Indonesia pada tahun 2018, yaitu 38 poin dengan peringkat ke-89. Artinya, terdapat negara-negara lain yang mengalami perbaikan, namun kita tidak.

Meskipun berbagai instansi berwenang telah melakukan upaya-upaya untuk memberantas korupsi, hingga saat ini tindak pidana korupsi masih marak. Seperti parasit yang terus bertengger di permukaan kulit, begitu sulit diberantas. Tak hanya di lingkungan instansi pemerintahan yang selama ini marak diberitakan, perilaku koruptif sebetulnya ada di detail keseharian masyarakat kita. Hal tersebut tercermin dari perbuatan menyerobot antrian, membolos sekolah, melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan, dan sederet contoh lain, yang bisa jadi tanpa sadar, mungkin kita kerap melakukannya. Hal tersebut terdengar cukup memprihatinkan, apalagi jika kita paham bahwa perilaku buruk tersebut bisa terwariskan kepada generasi-generasi setelah kita, khususnya anak-anak yang masa depannya ditentukan oleh didikan generasi kita.

Terkait hal tersebut, dalam langkah-langkah upaya pemberantasan korupsi, pendidikan antikorupsi perlu membidik juga bibit-bibit generasi muda Indonesia, di antaranya adalah anak-anak.

## Mengapa Anak-Anak?

Anak-anak adalah kuncup bunga yang akan merekah pada masanya nanti. Merekalah yang kelak akan memimpin Indonesia. Oleh karena itu, kita sama-sama berharap anak-anak dapat teredukasi dengan baik mengenai dampak buruk perilaku koruptif bagi keberlangsungan bangsa dan negara.

Anak-anak adalah calon pemimpin masa depan yang potensial. Edukasi antikorupsi terhadap anak-anak diharapkan dapat membantu mematahkan lingkaran perilaku koruptif di Indonesia. Terkait hal tersebut, anak-anak harus memiliki pembelajaran yang tepat tentang lingkungan yang menghargai integritas.

Mubayyinah (2015:235) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan antikorupsi pada anak usia dini, secara umum adalah: (1) Anak memahami dengan baik perilaku antikoruptif; (2) Anak memiliki perilaku sikap antikorupsi; (3) Memberikan bekal kepada anak agar kelak tidak melakukan perbuatan korupsi, karena sesungguhnya perbuatan korupsi itu selain merugikan orang lain, juga mencelakakan pelakunya sendiri; (4) Bagian dari upaya orang tua untuk menghentikan lahirnya koruptor dari lingkungan keluarga; (5) Mencetak generasi bangsa yang memiliki integritas diri yang tinggi; (6) Melakukan pencegahan perilaku korupsi sejak dini.

Terkait hal tersebut, edukasi antikorupsi sejak dini memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan memberikan pemahaman tentang dampak buruk perilaku koruptif kepada anak-anak, anak-anak akan mendapatkan bekal agar kelak tidak melakukan perbuatan korupsi, karena sesungguhnya perbuatan korupsi itu selain merugikan orang lain, juga mencelakakan pelakunya sendiri.

Edukasi antikorupsi tersebut dapat dimulai dari lingkungan keluarga dan sekolah, sebagai lingkungan terdekat dengan keseharian anak-anak. Namun, timbul pertanyaan, edukasi antikorupsi seperti apakah yang tepat untuk diterapkan kepada anak-anak. Sebab, terdapat perbedaan daya serap antara orang dewasa dengan anak-anak.

Anak-anak merupakan cerminan dari selembar kertas putih yang berpeluang ditulisi dengan berbagai warna tinta. Tinta apa yang akan kita goreskan pada lembaran bersih tersebut menentukan bagaimana masa depan bangsa ini. Oleh sebab itu, kita perlu mencermati pola edukasi antikorupsi apa yang tepat diterapkan kepada anak-anak.



Mungkin sangat sulit mengubah perilaku koruptif yang dilakukan para orang dewasa saat ini. Perilaku koruptif bisa jadi sudah menyatu dengan embusan napas sehari-hari. Namun, membentuk karakter generasi muda agar terhindar dari perilaku koruptif bukanlah hal yang tidak mungkin. Hal tersebut bisa diupayakan melalui edukasi antikorupsi sejak dini.

## Teori tentang Meniru

Anak-anak merupakan pembelajar yang berkembang melalui proses meniru. Hal ini menyebabkan anak-anak tersebut memerlukan *role model* dalam proses tumbuh kembangnya. Menurut Bandura (1997) sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Kemampuan untuk meniru orang lain merupakan alasan utama perkembangan kecerdasan dan teknologi manusia, sebab meniru merupakan cara yang efisien untuk mempelajari hal baru (Mussen, 1984:141). Dalam hal ini, inti dari pembelajaran sosial adalah pemodelan (*modelling*), dan pemodelan ini merupakan salah satu langkah paling penting dalam pembelajaran.

Pada tahun 1941, dua orang ahli psikologi, yaitu Neil Miller dan John Dollard mengemukakan bahwa peniruan (*imitation*) merupakan hasil proses pembelajaran yang ditiru dari orang lain. Perilaku peniruan tersebut terjadi karena manusia merasa telah memperoleh tambahan ketika kita meniru orang lain, dan memperoleh hukuman ketika kita tidak menirunya.

Tujuan meniru dari setiap anak berbeda-

beda. Hal tersebut bergantung pada fase usia mereka. Mussen mengelompokkan fungsi-fungsi yang berbeda dalam meniru, yaitu: (1) Pengaruh ketidakpastian; (2) Meniru untuk memajukan interaksi sosial; (3) Meniru untuk mempertinggi kemiripan terhadap orang lain; (4) Timbulnya emosi sebagai dasar dari meniru; (5) Meniru untuk mencapai tujuan.

Berkenaan dengan hal tersebut, anak-anak memerlukan percontohan atau figur teladan untuk menyerap nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan mereka. Anak-anak memerlukan contoh konkret, yang setiap hal baiknya dapat mereka serap. Hal ini bisa diperoleh melalui media-media edukasi yang di dalamnya menyisipkan nilai-nilai yang dapat diteladani oleh anak-anak.

### **Implementasi 9 Nilai Antikorupsi pada Berbagai Media Edukasi**

Edukasi antikorupsi perlu diberikan kepada anak-anak sejak dini. Selain dapat membentuk karakter anak, dengan adanya edukasi tersebut, diharapkan anak-anak dapat menghargai hak-hak orang lain, serta menahan diri untuk tidak melakukan perilaku yang melanggar aturan. Selanjutnya, mengajarkan tentang antikorupsi sejak dini juga turut menanamkan nilai kejujuran pada anak yang akan dibawanya hingga dewasa.

Sebagai bentuk antisipasi sekaligus melindungi mental bangsa dari perilaku koruptif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginisiasi 9 nilai antikorupsi. Kesembilan nilai antikorupsi tersebut, yaitu 1) kejujuran; 2) kepedulian; 3) kemandirian; 4) kedisiplinan; 5) tanggung jawab; 6) kerja keras; 7) kesederhanaan; 8) keberanian; dan 9) keadilan. Kesembilan nilai antikorupsi tersebut merupakan nilai-nilai dasar yang perlu disampaikan kepada masyarakat dalam rangka upaya pencegahan korupsi.

Dalam konteks edukasi bagi anak-anak, kesembilan nilai antikorupsi tersebut perlu diformulasikan secara khusus melalui suatu media penyampaian pesan sehingga mudah dicerna dan dipahami oleh anak-anak. Dalam hal ini, pesan-pesan antikorupsi perlu disampaikan secara halus, tidak memerintah, namun mengarahkan.

Barbara O'Keefe (Littlejohn, 2017: 30) mengemukakan bahwa terdapat beragam cara untuk memahami suatu pesan dan alasan komunikator dalam memutuskan pesan-pesan yang akan disampaikan kepada khalayak. Terkait hal tersebut, O'Keefe menggunakan istilah *message design logic* untuk mendeskripsikan proses penciptaan di balik suatu pesan. Rancangan suatu pesan di-

dasari oleh kecenderungan seseorang dalam mengatur tujuannya dalam upayanya menyampaikan pesan. Dalam hal ini, setiap pembuat pesan tentunya telah memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam proses penciptaan pesan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, KPK sebagai produsen pesan, telah menentukan strategi serta merumuskan formulasi yang tepat untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi melalui media yang dapat diterima oleh anak-anak secara tepat.

Sebagai contoh, KPK telah menerbitkan buku cerita bergambar dengan maskot "Si Kumbi", serta memproduksi film animasi berseri bertajuk "Sahabat Pemberani". Melalui kedua media tersebut, KPK mengemas dan memformulasikan nilai-nilai antikorupsi sedemikian rupa, sehingga akan mudah diserap oleh anak-anak.

Buku cerita bergambar dan film tersebut merupakan dua di antara sekian banyak media yang efektif untuk menyampaikan gagasan tentang nilai-nilai antikorupsi. Dalam tataran komunikasi, buku cerita bergambar dan film ini pun tidak hanya dipandang sebagai hiburan yang menyajikan tontonan dan cerita. Keduanya merupakan media komunikasi yang efektif dalam menyampaikan gagasan tentang nilai-nilai antikorupsi. Bahkan, film animasi dikatakan memiliki dampak yang lebih dibandingkan dengan pemanfaatan buku. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Marsh (dalam Rahmatullah, 2011:5), bahwa film animasi dapat memberikan pengalaman belajar kepada anak secara lebih bermakna dan menghasilkan stimulus yang lebih besar dibandingkan sekadar membaca buku teks. Dalam hal ini, film animasi telah memadukan unsur audio, video, dan teks menjadi satu kesatuan penyajian. Akibatnya, film animasi memiliki banyak kelebihan, khususnya tentang dalam hal daya tarik.

Anak-anak seringkali mengidolakan tokoh-tokoh tertentu dalam cerita fiksi atau film animasi favorit mereka. Bahkan, terkadang anak-anak meneladani setiap gerak, laku, atau sikap karakter-karakter dari karakter yang diserapnya. Di situlah letak peluang bagi para produsen pesan untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi secara lembut, tanpa terkesan memerintah atau memaksakan. Produsen pesan perlu menggunakan formulasi khusus agar kesembilan nilai antikorupsi dapat tersampaikan dengan baik kepada anak-anak. Formulasi khusus tersebut meliputi pemanfaatan *role model* yang dapat diteladani oleh anak-anak, bobot cerita, dan cara penyampaian pesan-pesan antikorupsi.

Terkait pemanfaatan *role model*, merujuk pada teori imitasi yang dikemukakan sebelumnya, anak-anak merupakan pembelajar yang berkembang melalui proses meniru. Hal ini menyebabkan bahwa anak-anak tersebut memerlukan *role model* dalam proses tumbuh kembangnya. Terkait hal tersebut, produsen pesan perlu menciptakan tokoh-tokoh yang dapat menjadi idola baru bagi anak-anak.

Kemampuan penerimaan informasi anak-anak berbeda dengan kemampuan orang dewasa. Kita tidak bisa serta merta mengatakan “jangan korupsi” kepada anak-anak. Di sinilah letak pentingnya kemampuan untuk memformulasikan nilai-nilai antikorupsi bagi anak-anak. Apa lagi saat ini akses anak-anak menuju media sosial, dengan segala dampak baik dan buruknya, terasa sangat mudah. Setiap hari, anak-anak kita diintai oleh berbagai tayangan yang dapat diakses dengan mudah melalui gawai pintar. Terkadang, kita yang dililit kesibukan pekerjaan sehari-hari, menyerahkan begitu saja pandang mata anak kita pada layar gawai pintar itu.

Mungkin anak-anak zaman sekarang sulit dipisahkan dari gawai pintar, yang tugasnya adalah memanjakan mata mereka. Namun, se-pintar apapun teknologi, kita sebagai orang tua tetap pemegang kendali. Kita bisa mulai dengan membatasi atau menyeleksi tayangan yang dapat mereka konsumsi. Tak mudah memang, tapi masih bisa diupayakan. Kita bisa membatasi durasi penggunaan gawai pintar, lantas mensubstitusinya dengan kegiatan membaca buku cerita bersama, atau nonton film animasi edukatif bersama. Dalam hal ini, kita memang perlu meluangkan waktu ekstra, di tengah himpitan beban kerja. Sekali lagi, itu bukan hal yang mudah, namun masih dapat kita upayakan demi masa depan anak-anak kita.



Perilaku koruptif yang membunyah di tengah masyarakat merupakan hal yang menggelisahkan. Untuk memperbaikinya bukanlah hal yang mudah. Meski upaya optimal telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, juga BPK melalui pemeriksaannya, pada kenyataannya dari tahun ke tahun korupsi masih saja menorehkan namanya dalam lembaran sejarah bangsa. Tapi, kita perlu optimistis dengan hari depan. Sebab, saat ini ada anak-anak, generasi penerus kita, yang masih dapat kita arahkan. Kita yang bertanggungjawab, hal-hal baik apa yang akan kita tanamkan dalam diri anak-anak itu. Edukasi macam apa yang akan kita wariskan sebagai bekal mereka melangkah?

Sesekali, tataplah dalam-dalam mata anak-anak kita. Tegakah kita membiarkan cahaya dalam bening mata itu redup saat dewasa? Sanggupkah kita menyaksikan anak-anak itu tumbuh menjadi figur-figur koruptif sebab tak pernah mendapat bekal yang cukup dari kita? Itu adalah pekerjaan rumah dan tanggung jawab kita bersama.

Yakin saja dulu, masa depan bangsa ini akan lebih baik. Anak-anak kita akan tumbuh jadi generasi terbaik, yang melanjutkan perjuangan kita dalam berbagai ruang dan bidang. Semoga. ●

#### Referensi:

- Bandura, Albert. (1997). *Self-Efficacy - The Exercise of Control*. New York: W.H. Freeman and Company.
- Botnev, V., Gorlanov, G., Illarionova, T., Kirichenko, A., Koroteeva, O., & Nasriddinov, T. (2014). *Anti-Corruption Policy in Education*. Published Papers at Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2017). *Theories of Human Communication Eleventh Edition*. Illinois: Waveland Press.
- Mubayyinah, Fira. (2014). *SEMAI: Sembilan Nilai Antikorupsi dalam Pendidikan Anak Usia Dini*. Al Hikmah: Indonesian Journal of Early Childhood Islamic Education, Vo. 1 (2), 2017, PP.223-238.
- Mussen, Paul Henry, dkk. (1984). *Perkembangan dan Kepribadian Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Rahmatullah, Muhammad. (2011). *Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran Film Animasi terhadap Hasil Belajar IPS*. Disertasi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sampson, S. (2015). *The Anti-corruption Package*. *Ephemera Theory & Politics in Organization*, 15(2), 435-443.

[transparency.org](http://transparency.org)

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email **wartapemeriksa@bpk.go.id** dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa *fee* menulis sebesar Rp750.000.

# Permintaan Informasi & Pengaduan Masyarakat Lebih Mudah Pakai PPID BPK Mobile

**Segera Unduh di Playstore  
BPKawan!!**





1

dilanjutkan dengan menekan peluit elektrik  
 dilanjutkan dengan membunyikan permainan trad  
 Betawi oleh seluruh peserta



2

**1-2**

Ketua BPK Isma Yatun mengha-  
 diri Hari Antikorupsi Sedunia  
 (Hakordia), 9 Desember 2022.  
 Kegiatan yang diinisiasi KPK ter-  
 sebut secara resmi dibuka oleh  
 Ketua KPK, Firlu Bahuri. Turut hadir  
 Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua  
 DPD La Nyalla Mattalitti, Ketua  
 Mahkamah Agung Muhammad  
 Syarifuddin, mantan wakil presiden  
 Jusuf Kalla, dan sejumlah menteri.



3



4



5

**3-5**

Ketua BPK Isma Yatun menghadiri HUT DWP BPK ke-23 serta Hari Ibu yang diselenggarakan oleh Ikistra dan DWP Setjen BPK RI, 15 Desember 2022.



6

**6-9**

Khitanan Massal dan Donor Darah diha-  
 diri Ketua BPK Isma Yatun, 20 Desember  
 2022. Acara terse-  
 but diselenggarakan  
 dalam rangka HUT  
 BPK RI yang ke-76.



7



8



9



10



11



14



12



13

**10-14**

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota II/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Daniel Lumban Tobing, Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi, Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Haerul Saleh, Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Pius Lustrilang, dan Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Hendra Susanto menghadiri acara Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH. sebagai Profesor Bidang Ilmu Hukum Universitas Pakuan, 1 Desember 2022.



15

**15-16**

Nobar Final Bola dihadiri oleh Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota II/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Daniel Lumban Tobing, 18 Desember 2022.

**17**

Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi memberikan sambutan dalam acara Konsinyering AKN III, 16-17 Desember 2022.



16



17



18



19



20

**18**

Baksos KORPRI dihadiri Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Ahmadi Noor Supit di Cianjur, 23 Desember 2022.

**19**

Taklimat Awal PT LEN (Diefend ID) dihadiri oleh Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Hendra Susanto, 6 Desember 2022.

**20**

Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Hendra Susanto menghadiri wisuda CGCAE dan CIAE, di Jakarta, 8 Desember 2022.



## Kuis

Apa yang dibentuk oleh BPK untuk mengoordinasikan dan mengolaborasi penanggulangan serta pemulihan terhadap insiden keamanan siber secara cepat?



Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email [wartapemeriksa@bpk.go.id](mailto:wartapemeriksa@bpk.go.id) dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.

Majalah *Warta Pemeriksa* berhasil mendapatkan **Terbaik II** untuk kategori Penerbitan Media Internal (*Inhouse Magazine*) Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri. Penghargaan diberikan pada **Malam Anugerah Media Humas 2022** yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kamis 24 November 2022.





Selamat Natal  
dan Tahun Baru



[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



BPK RI Official



[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpk.ri](https://www.tiktok.com/@bpk.ri)